



Tata Kelola Program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul

Governance of Satu Rumah Satu Sarjana Program in Panggungharjo Village, Sewon, Bantul

Rista Adista Osagi¹, Dwi Harsono²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 24-07-24

Diperbaiki 29-07-24

Disetujui 01-08-24

Kata Kunci:

Tata Kelola, *Good Governance*, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Efektivitas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tata kelola berjalan pada program Satu Rumah Satu Sarjana yang berjalan di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini mencakup Pemerintah Desa Panggungharjo, CSR, Penerima Manfaat Program, serta Masyarakat. Sumber data yang digunakan yakni observasi dan wawancara sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data sekunder. Instrumen penelitian ini adalah peneliti dengan menggunakan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang berjalan di Desa Panggungharjo terkait program Satu Rumah Satu Sarjana masih menemui kelemahan. Tampak bahwa proses monitoring yang ada belum terdokumentasikan dengan rapi sehingga berakibat pada laporan yang belum optimal. Namun, apabila dilihat dari aspek ketercapaian, ketercapaian Program Satu Rumah Satu Sarjana memang sudah ada. Hal itu dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat penerima program yang telah berhasil lulus menjadi sarjana. Dengan berbagai evaluasi yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin mengadopsi atau melaksanakan program yang serupa agar penyelenggaraannya dapat lebih baik.

ABSTRACT

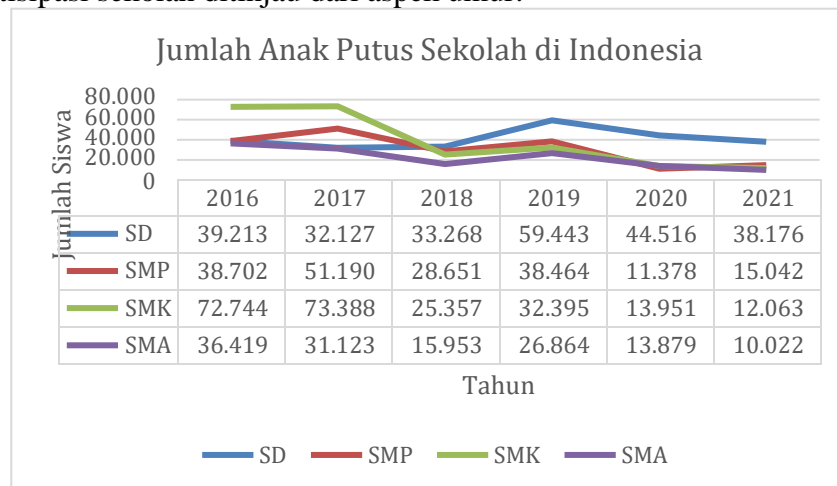
Keywords:

Governance, *Good Governance*, Accountability, Transparency, Participation, Effectiveness

This research aims to examine how governance works in the Satu Rumah Satu Sarjana program, which runs in Panggungharjo Village, Sewon, Bantul. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Informants in this research include the Panggungharjo Village Government, CSR, program beneficiaries, and the community. The data sources used are observation and interviews as primary data and documentation as secondary data. The instruments of this research are observation, interview, and documentation guidelines. The data validity checking technique uses source triangulation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the governance in Panggungharjo Village regarding the Satu Rumah Satu Sarjana program still has weaknesses. It appears that the existing monitoring process has not been neatly documented, resulting in suboptimal reports. However, in terms of achievements, the Satu Rumah Satu Sarjana Program has shown success. This can be seen from the number of program recipients who have successfully graduated as undergraduates. With the various evaluations available, it is hoped that this research can serve as an example for other regions that wish to adopt or implement similar programs so that their implementation can be improved.

1. Pendahuluan

Pendidikan diibaratkan seperti jembatan bagi manusia untuk dapat mengembangkan kemampuan atau potensi diri yang dimiliki [1]. Dapat dikatakan bahwa Pendidikan menjadi salah satu jalur bagaimana kita dapat hidup dengan bermakna. Salah satu pernyataan mengenai pendidikan yang sangat populer berasal dari pernyataan Nelson Mandela yakni *“Education is the most powerful weapon we can use to change the world and for self-enlightenment”* dimana pernyataan tersebut dapat dimaknakan sebagai pendidikan merupakan senjata terkuat untuk dapat mengubah keadaan dunia dan memposisikan diri secara baik dalam kehidupan [2]. Namun, apabila melihat kondisi di Indonesia, sistem pendidikan Indonesia belum dapat dikatakan berjalan dengan baik sepenuhnya. Hal itu disebabkan karena Indonesia belum mampu menduduki peringkat bagian atas dalam ranking sistem pendidikan dunia. *Programme for International Student Assessment (PISA)* pada tahun 2018 melakukan survei terkait dengan sistem pendidikan Indonesia dan menuai hasil bahwa sistem pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke-74 dari 79 negara [3]. Peringkat tersebut masuk dalam kategori rendah dan dapat menjadi acuan bahwa pendidikan di Indonesia harus diperbaiki agar sistem pendidikan di Indonesia dapat unggul. Pendidikan di Indonesia ditinjau dari segi kualitas akhir-akhir ini sangat memprihatinkan karena banyaknya permasalahan sistem pendidikan yang terjadi sehingga mengakibatkan kualitas pendidikan Indonesia menjadi rendah [1]. Permasalahan pendidikan di Indonesia salah satunya adalah tingginya angka putus sekolah dan semakin menurunnya angka partisipasi sekolah ditinjau dari aspek umur.

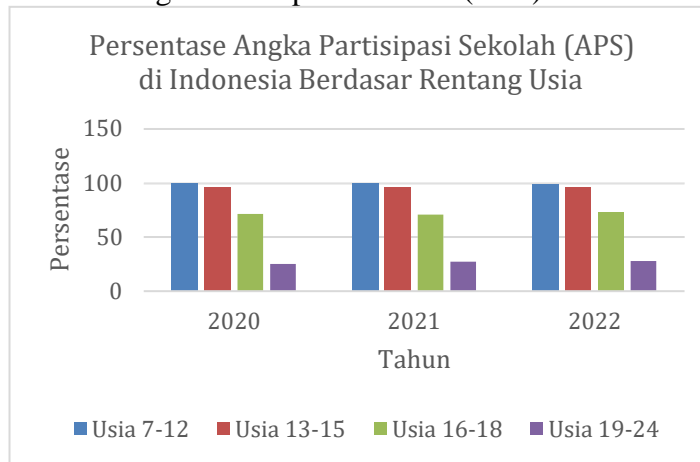


Gambar 1. Data Anak Putus Sekolah di Indonesia

Sumber: Kemendikbudristek, (2022)

Fenomena putus sekolah merupakan salah satu fenomena pada bidang pendidikan yang memprihatinkan. Putus sekolah merupakan fenomena saat seseorang meninggalkan sekolah atau pendidikan sebelum menyelesaikan masa studi yang seharusnya [4]. Data diatas merupakan data angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2016-2021 berdasar tingkat pendidikan. Data yang tersedia sangat fluktuatif tetapi tetap dapat terlihat bahwa jumlah anak yang putus sekolah

sangat banyak. Selain permasalahan angka putus sekolah, Indonesia juga bergelut dengan permasalahan Angka Partisipasi Sekolah (APS).



Gambar 2. Persenan APS di Indonesia Berdasar Rentang Usia
Sumber: BPS RI, (2022)

Berdasar data, dapat terlihat bahwa pada rentang usia 19-24 atau rata-rata usia anak memasuki perguruan tinggi, persentase APS yang ditunjukkan pada data sangat kecil, hanya berkisar 25%. Kondisi ini menjadi suatu permasalahan dikarenakan akan semakin sedikit pula anak di Indonesia yang melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi.

Pemberian program beasiswa menjadi salah satu upaya yang kerap dilakukan untuk mempertahankan anak agar dapat mengenyam pendidikan. Dalam melaksanakan kebijakan terutama dalam hal pengelolaan dana beasiswa, dibutuhkan aparat pemerintahan yang profesional, jujur, dan beretika agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Sikap profesional tersebut sudah diterapkan oleh Desa Panggungharjo yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Desa Panggungharjo pada tahun 2021 disoroti oleh publik dikarenakan dinobatkan menjadi Desa Anti Korupsi pertama di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [5]. Melihat fakta bahwa Desa Panggungharjo sudah dinobatkan menjadi Desa Anti Korupsi memberikan arti bahwa prestasi ini harus tetap dipertahankan. Hal yang dapat dilakukan yakni membangun pilar anti korupsi yang dapat dicapai melalui pendidikan karena pendidikan berperan penting dalam pembentukan norma budaya dan karakter anti korupsi. Sejalan dengan hal itu, peran pendidikan pada tingkat perguruan tinggi juga berperan sebagai komponen penggerak, pelindung integritas bangsa, dan komponen dalam upaya pemberantasan korupsi. [6]. Dalam hal ini, Desa Panggungharjo memiliki kebijakan bidang pendidikan untuk tingkat perguruan tinggi yakni program beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana. Program Satu Rumah Satu Sarjana merupakan salah satu program pada bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo. Alasan pemerintah Desa Panggungharjo mengeluarkan program tersebut yakni Desa Panggungharjo ingin terkhusus warganya yang sedang menempuh pendidikan tidak putus sekolah atau putus pendidikannya.

Praktik pemerintahan melalui terciptanya kemitraan atau proses kerja sama yang sehat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, solid, bertanggung jawab, dan sinergis. Penyelenggaraan tersebut terkandung dalam konsep *Good Governance* yang merupakan tolak ukur suatu pemerintahan melakukan kegiatan pemerintahan yang baik melalui pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Governance* yang ada di dalamnya [7]. Begitu pula dengan penyelenggaraan program yang diusung oleh Desa Panggungharjo ini dimana program Satu Rumah Satu Sarjana harus dikelola dengan bijaksana agar dapat memenuhi target tujuan dari diselenggarakannya program ini. Tata kelola yang ideal dapat tercipta karena adanya pengelolaan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik ini nantinya akan menghasilkan suatu sistem pemerintahan yang disebut *good governance* [8]. Konsep *Good Governance* dipilih peneliti untuk meninjau permasalahan yang diusung dikarenakan melalui konsep *Good Governance* maka akan membentuk suatu birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Terdapat sembilan prinsip mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Namun hanya beberapa prinsip saja yang dijadikan prinsip utama dikarenakan telah melandasi *Good Governance*. Prinsip tersebut yakni prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi [9] dan dalam penelitian ini, peneliti menambahkan prinsip efektivitas untuk ikut ditinjau lebih lanjut.

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian relevan sebelumnya yakni terletak pada penggunaan konsep *Good Governance* dalam meninjau tata kelola yang ada pada Desa Panggungharjo. Penelitian ini mengungkap permasalahan terkait dengan Tata Kelola Program Satu Rumah Satu Sarjana Di Desa Panggungharjo Sewon Bantul yang ditinjau menggunakan beberapa indikator *Good Governance*. Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam dunia pemerintahan terkhusus dalam penelitian ini menyorot pada bidang pendidikan. Difokuskan pada sektor pendidikan karena menjadi salah satu sektor penting bagi kehidupan bernegara untuk membentuk masyarakat yang berintegritas dan melek pendidikan. Selain itu, dikarenakan program Satu Rumah Satu Sarjana ini sudah berlangsung sejak lama yakni sudah sejak 2012, peneliti juga ingin mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan atau capaian program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Panggungharjo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi Pemerintah Desa Panggungharjo. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan gambaran dan rekomendasi kepada pihak yang ingin mengadopsi program Satu Rumah Satu Sarjana untuk dapat diterapkan di wilayah lain sehingga dapat lebih baik. Hal itu dilakukan agar pihak yang akan terlibat dapat melihat dan menambal keterbatasan atau kekurangan yang ada sebelumnya sehingga semua pihak dapat bersinergi bersama mewujudkan Satu Rumah Satu Sarjana yang lebih baik di berbagai daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan memahami subjek penelitian baik dari segi perilaku, peran, tindakan, atau lainnya secara keseluruhan menggunakan cara

deskriptif yang dituangkan dalam bentuk kata dan bahasa [10]. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk dapat memberikan hasil penelitian yang bersifat menggambarkan [11]. Penelitian ini telah meninjau serta mengetahui bagaimana tata kelola yang berjalan di Desa Panggungharjo berkenaan dengan program Satu Rumah Satu Sarjana. Peneliti telah melakukan penelitian dilanjut dengan menyajikan data hasil penelitian, serta telah menjabarkan data atau informasi yang diperoleh berdasar fakta-fakta yang ada. Untuk itu penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif ini dipilih dikarenakan peneliti telah mengumpulkan data sesuai fakta yang terjadi di lapangan sehingga pada akhirnya diperoleh data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Temuan data tersebut yakni deskripsi mengenai tata kelola yang dijalankan di Desa Panggungharjo terkait dengan program Satu Rumah Satu Sarjana.

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul. Lokasi penelitian ini dipilih peneliti dikarenakan Pemerintahan Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang mengeluarkan kebijakan program beasiswa yang disebut Program Satu Rumah Satu Sarjana. Desa Panggungharjo juga telah mendapat predikat sebagai Desa Antikorupsi pertama di Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai Desa berprestasi. Pengambilan data dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Waktu penelitian yang digunakan untuk proses pengambilan data dilaksanakan pada bulan Oktober 2023-Januari 2024.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terkait wawancara, informan yang dipilih peneliti telah dipertimbangkan agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan akurat. Informan tersebut meliputi Pemerintah Desa Panggungharjo, pihak CSR, penerima manfaat program, dan masyarakat lokal. Peneliti menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dan instrumen pendukung dalam penelitian ini berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Observasi telah dilakukan peneliti melalui pengamatan secara langsung di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh data mengenai informasi ruang (tempat), kegiatan yang dilakukan aktor/pelaku, dan objek di lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti di lapangan adalah menggali informasi mengenai struktur organisasi untuk mengidentifikasi peran aktor yang terlibat, menggali informasi mengenai koordinasi atau rapat rutin para aktor yang terlibat dalam program Satu Rumah Satu Sarjana, menggali informasi mengenai bagaimana pengelolaan informasi antar aktor yang terlibat dalam program Satu Rumah Satu Sarjana, dan menggali informasi mengenai ketersediaan informasi yang cukup tentang Program Satu Rumah Satu Sarjana bagi masyarakat.
- b. Wawancara dalam penelitian ini telah dilakukan secara wawancara terstruktur atau wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya untuk memperoleh informasi yang mendalam. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti tidak menemui

hambatan yang berarti. Hambatan yang dialami hanya sekedar perbedaan waktu luang antara peneliti dengan beberapa subjek penelitian saat ingin melakukan wawancara. Namun hambatan tersebut dapat teratasi melalui proses negosiasi antara peneliti dan beberapa subjek penelitian. Data yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan wawancara adalah keterlibatan peran dan relasi masing-masing subjek penelitian yang terkait dan tata kelola yang berjalan di Desa Panggungharjo terlebih tata kelola dalam program Satu Rumah Satu Sarjana.

- c. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan dokumen yang bersumber dari instansi terkait yaitu Desa Panggungharjo dan internet. Peneliti mendapatkan data dokumen berupa data program Satu Rumah Satu Sarjana, foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan Program Satu Rumah Satu Sarjana, foto-foto kondisi wilayah Desa Panggungharjo, dan sebagainya.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dipilih dikarenakan peneliti ingin menggali kebenaran data berdasar apa yang terjadi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan berdasar informasi yang didapat dari subjek penelitian. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara, peneliti melakukan proses pendeskripsian data dan pengelompokan data yang bertujuan untuk melihat subjek penelitian yang memiliki pandangan sama atau berbeda yang kemudian dianalisis oleh peneliti dan dilakukan *member check* dengan beberapa sumber tersebut. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui bagaimana tata kelola dalam sebuah program yang dijalankan, pada bagian pembahasan ini, peneliti menganalisisnya menggunakan beberapa indikator Good Governance. Penggunaan indikator Good Governance tersebut menjadi ukuran keberhasilan yang dapat memberikan gambaran lingkup administrasi publik yang memiliki ciri pemerintahan baik [9]. Indikator tersebut berfokus pada peninjauan terhadap Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Efektivitas.

3.1 Akuntabilitas

Dalam indikator akuntabilitas, hal yang perlu diingat adalah capaian akuntabilitas yang berkualitas dapat terhambat apabila terdapat kekurangan dalam beberapa aspek yang mencakup pola kepemimpinan, sumber daya, kapasitas teknologi, hubungan koordinasi, dan birokrasi [12]. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemerintah Desa Panggungharjo masih mengalami kendala pada bagian pengelola karena minimnya SDM sehingga terkadang pengelolaannya masih bersifat sederhana dan berimbas pada kinerja yang tumpang tindih. Selain itu, sarana yang ada juga kurang memadai seperti komputer yang sedang rusak dan belum diperbaiki sehingga turut serta menambah permasalahan yang ada. Dalam konsep akuntabilitas publik, publik pada dasarnya juga memiliki hak untuk turut berpartisipasi dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengannya. Dan apabila

suatu hari terjadi penyimpangan atau pelemahan akuntabilitas, maka pemerintah atau lembaga publik yang bersangkutan wajib untuk memberi pertanggungjawaban [13]. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Pemerintah Desa Panggungharjo telah melakukan evaluasi untuk Program Satu Rumah Satu Sarjana untuk membahas apa saja yang masih dirasa kurang untuk segera dilakukan perubahan. Namun, evaluasi tersebut hanya dilakukan oleh pihak internal saja atau hanya dari Pemerintah Desa Panggungharjo saja sehingga belum mengikutsertakan para penerima Program Satu Rumah Satu Sarjana secara langsung. Apabila mengacu pada pendapat Bovens, evaluasi satu arah ini berdampak pada terbatasnya melihat perspektif dari sudut pandang lain yang dalam penelitian ini mengarah pada penerima Program Satu Rumah Satu Sarjana. Pemerintah Desa Panggungharjo telah berupaya untuk memberikan akuntabilitas yang terbaik dalam setiap program yang diinisiasi terkhusus dalam penelitian ini adalah Program Satu Rumah Satu Sarjana. Dengan mengadopsi nilai pendekatan kepada masyarakat melalui akuntabilitas sosial, hal ini akan memastikan partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam program pemerintah desa salah satunya program Satu Rumah Satu Sarjana agar dapat terus berlanjut. Namun, dalam semuanya itu, berdasar hasil temuan dilapangan, masih ditemukan kekurangan akuntabilitas yakni terkait dengan minimnya pengelola SDM dan juga sarana yang kurang memadai. Dengan kondisi yang demikian, dapat memvalidasi pernyataan teori yang sebelumnya telah diulas bahwa capaian akuntabilitas yang berkualitas dapat terhambat apabila terdapat kekurangan dalam beberapa aspek yang mencakup pola kepemimpinan, sumber daya, kapasitas teknologi, hubungan koordinasi, dan birokrasi.

3.2 Transparansi

Dalam indikator transparansi, transparansi tak melulu hanya berkaitan dengan pengaksesan data dan informasi tentang identitas, namun juga melekat dalam hal keuangan. Operasional yang baik dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang lebih dari cukup saat suatu lembaga mengupayakan transparansi keuangan kepada publik [14]. Sejalan dengan pendapat tersebut, sumber pendanaan Program Satu Rumah Satu Sarjana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Seluruh mekanisme keuangan dikelola oleh kepala urusan keuangan Desa Panggungharjo. Hasil temuan dilapangan, dana APBDes yang dikelola oleh kepala urusan keuangan desa dengan rutin di transparansikan kepada warga desa melalui website resmi Desa Panggungharjo dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dana desa. Selain melalui website, upaya transparansi dana desa tersebut juga dipublikasikan melalui media sosial dan pencetakan banner yang ditempelkan di tempat strategis agar warga desa yang tidak dapat mengakses layanan internet tetap dapat membaca dan mengetahui pelaporannya. Segala bentuk upaya transparansi selalu diusahakan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo kepada warganya, maka tak heran apabila Kalurahan Panggungharjo ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi pertama di Indonesia pada tahun 2021 [5]. Terpilihnya Kalurahan Panggungharjo sebagai Desa Anti Korupsi pertama di Indonesia tak lain karena Kalurahan Panggungharjo telah memenuhi komponen dan indikator yang ditetapkan dalam Buku Panduan Desa Anti Korupsi. Melalui penghargaan tersebut,

Kalurahan Panggungharjo juga menjadi Desa Percontohan untuk desa-desa lain di Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang baik dan bersih. Adanya transparansi dapat dilihat dari beberapa aspek salah satunya tersedianya akses informasi bagi publik atau masyarakat untuk dapat melihat setiap segi dari kebijakan pemerintah yang dijalankan [9]. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Panggungharjo memberikan transparansi yang sebebaskan-bebasnya dengan mempersilahkan warganya untuk dapat mengakses segala informasi dan data kecuali yang diatur dalam Undang-Undang yang diperlukan melalui *website* Panggungharjo atau dapat langsung datang ke kantor desa. Selain itu juga dibantu dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo kepada warga desa. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan konsep transparansi yang dikemukakan oleh Sedarmayanti yang memaparkan bahwa salah satu aspek transparansi adalah adanya akses informasi dari setiap sisi kebijakan pemerintah sehingga masyarakat atau publik dapat menjangkaunya. Keterbukaan informasi dan segala publikasi laporan serta dokumen yang ada akan mengantisipasi terjadinya tindak penyelewengan atau manipulasi data.

3.3 Partisipasi

Dalam indikator partisipasi, partisipasi merupakan salah satu bentuk perwujudan dari prinsip akuntabilitas secara sosial karena partisipasi akan memberikan peluang untuk publik atau masyarakat turut serta dalam proses atau kegiatan pemerintahan yang sedang berjalan baik secara langsung maupun tidak langsung [15]. Selain berhubungan dengan keterlibatan dari masyarakat sekitar, partisipasi juga menyangkut dengan kontribusi atau keterlibatan dari pemangku kepentingan yang lain. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa dalam Program Satu Rumah Satu Sarjana, proses partisipasi ini dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama dengan beberapa pihak seperti dari pihak Corporate Social Responsibility (CSR), pihak kampus, dan juga lembaga desa BUMDes Panggung Lestari. Tak hanya dari segi pelaksanaan saja, partisipasi juga harus hadir pada saat evaluasi. Pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan kebijakan atau program, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi akan menjadikan masyarakat lebih paham mengenai seluk beluk kebijakan atau program yang terkait [16]. Dipandang dari kacamata penerima program Satu Rumah Satu Sarjana, sebagian menyimpulkan bahwa secara keseluruhan dari prinsip partisipasi yang diberikan menuai hasil partisipasi memang sudah cukup baik dan di rasa cukup. Namun, sebagian juga menyimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan khususnya dalam hal evaluasi karena penerima Program Satu Rumah Satu Sarjana masih belum diikutsertakan dalam rapat evaluasi sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara di dalam forum. Belum adanya keikutsertaan penerima program Satu Rumah Satu Sarjana dalam rapat evaluasi juga menyebabkan aktivitas pelaporan dari sudut pandang penerima program juga menjadi sangat kurang. Padahal melalui forum evaluasi rutin, aktivitas penerima program Satu Rumah Satu Sarjana dapat di *tracking* berkenaan dalam mekanisme atau proses masa perkuliahan maupun pada saat telah selesai perkuliahan. Selain itu tidak adanya keterlibatan penerima manfaat program secara langsung dalam rapat evaluasi juga tidak sejalan dengan salah satu konsep atau teori lokal yang mirip

dengan teori Good Governance yakni Teori Gotong Royong oleh Bowen, 1986. Teori Gotong Royong merupakan sebuah konsep yang mencerminkan prinsip tata kelola partisipatif yang akan menekankan pada keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses musyawarah atau pengambilan keputusan [17]. Dengan demikian, apabila mengacu pada pendapat Bowen, maka Pemerintah Desa Panggungharjo belum menjalankan poin penting yakni musyawarah dari berbagai pemangku kepentingan dalam Program Satu Rumah Satu Sarjana. Namun, terlepas dari masalah tersebut, Pemerintah Desa Panggungharjo telah membuka ruang partisipasi untuk masyarakat dan pihak yang ingin bekerjasama atau bermitra maupun yang ingin terlibat dalam implementasi berbagai kebijakan yang telah dibuat. Hal tersebut sejalan dengan makna partisipasi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk dapat berorganisasi, berkumpul, maupun berpartisipasi [9].

3.4 Efektivitas

Dalam indikator efektivitas, efektivitas sistem pemerintah sangat ditentukan oleh berhasil atau gagalnya penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui efektivitas, pelayanan publik yang terselenggara harus dapat melayani masyarakat secara maksimal namun dengan sumber daya yang terbatas [18]. Hasil di lapangan membuktikan bahwa dalam mengerjakan seluruh tanggungjawab yang berkaitan dengan urusan program Satu Rumah Satu Sarjana, Bapel JPS yang merupakan lembaga yang menaungi program tersebut mengaku bahwa sebenarnya mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM). Namun dengan kekurangan tersebut, tiga personil didalamnya berupaya untuk melakukan '*tambal-sulam*' tugas dan tanggungjawab sehingga saling melengkapi. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, munculnya keluhan oleh publik sangat dihindari. Namun, apabila muncul suatu keluhan oleh publik, maka aktor kebijakan dalam pemerintah tersebut harus segera membentuk mekanisme yang akan menyelesaikan keluhan yang muncul sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar keluhan dapat ditangani dengan efektif dan dapat terselesaikan dengan baik [18]. Dilihat dari segi ke-efisiensi operasional, kepuasan konsumen, dan kualitas hasil. Efektivitas yang ada dalam Program Satu Rumah Satu Sarjana berdasar dari hasil wawancara oleh beberapa narasumber menunjukkan hasil yang masih perlu dilakukan peningkatan. Banyak poin yang harus di garis bawahi oleh Pemerintah Desa Panggungharjo dalam memberikan pelayanan yang terkhusus dalam penelitian ini adalah program Satu Rumah Satu Sarjana untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan perbaikan. Secara internal masih banyak yang perlu dievaluasi, namun apabila dilihat dari pandangan eksternal, efektivitas yang tercipta di Desa Panggungharjo sudah memenuhi tepat sasaran. Efektivitas yang dinilai baik oleh pihak eksternal tersebut dilihat dari sisi tepat sasaran dan ke-efektifan administrasi data. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, memang efektivitas yang ada dalam program Satu Rumah Satu Sarjana masih perlu perbaikan untuk kedepannya. Pemerintah harus dapat mengambil tindakan proaktif agar efektivitas program Satu Rumah Satu Sarjana dapat ditelusuri lebih lanjut. Pemerintah harus dapat membangun feedback atau umpan balik yang efektif agar dapat menerima masukan atau saran dari penerima program.

4. Kesimpulan

Tata kelola yang berjalan di Desa Panggungharjo terkait penyelenggaraan program Satu Rumah Satu Sarjana masih menunjukkan kekurangan karena belum memenuhi aspek-aspek yang ada dalam setiap indikator yang digunakan. Memang program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Panggungharjo telah membawa dampak yang baik karena melalui program tersebut, masyarakat dengan kelompok rentan memiliki peluang untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan bebas biaya. Namun, dalam proses pengkajian terkait dengan tata kelola yang berjalan dalam program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Panggungharjo masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut seperti tidak ditemukannya beberapa data yang dibutuhkan dan kekurangan dalam setiap indikator yang digunakan untuk mengkaji.

Pada indikator akuntabilitas, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Panggungharjo memang sudah mengupayakan penyelenggaraan akuntabilitas sebaik mungkin baik dari akuntabilitas secara administratif maupun secara sosial. Namun dari semuanya itu, masih menemui kekurangan yang disebabkan oleh masih kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) pada Bapel JPS yang merupakan badan desa yang mengurus tentang program Satu Rumah Satu Sarjana. Pada indikator transparansi, Pemerintah Desa Panggungharjo mempersilahkan warganya untuk dapat mengakses segala informasi dan data kecuali yang diatur dalam Undang-Undang yang diperlukan melalui *website* Panggungharjo atau dapat langsung datang ke kantor desa. Dengan kebebasan tersebut, timbul *public trust* dari masyarakat terhadap Pemerintah Desa Panggungharjo. Pada indikator partisipasi, Pemerintah Desa Panggungharjo hingga saat ini belum mengadakan evaluasi menyeluruh bersama penerima program Satu Rumah Satu Sarjana sehingga berdampak pada terbatasnya melihat perspektif dari sudut pandang lain yang dalam penelitian ini mengarah pada penerima Program Satu Rumah Satu Sarjana. Selain itu, belum terdapat mekanisme pelaporan yang rutin yang dilakukan oleh penerima program Satu Rumah Satu Sarjana sehingga partisipasi dalam hal pelaporan masih kurang. Namun terlepas dari itu, Pemerintah Desa Panggungharjo telah membuka ruang partisipasi untuk masyarakat Panggungharjo dapat turut serta dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan membuka ruang partisipasi bagi pihak luar yang ingin bermitra. Dan untuk indikator efektivitas, efektivitas Pemerintah Desa Panggungharjo berkenaan dengan program Satu Rumah Satu Sarjana belum dapat diukur secara tepat apakah indikator efektivitas dalam program Satu Rumah Satu Sarjana memang sudah efektif atau belum. Hal itu dikarenakan peneliti dan Pemerintah Desa Panggungharjo belum mampu untuk mengkuantifikasikan hal yang bersifat kualitatif karena bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Hal tersebut terjadi lantaran basis dari efektivitas tidak lagi *output* tetapi *outcome* sehingga dalam hal penetapan ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas itulah yang menjadi kendala.

Terkait dengan hal tersebut, dalam tata kelolanya, seharusnya Pemerintah Desa Panggungharjo lebih mempertegas mengenai persoalan administrasi termasuk didalamnya aktivitas pelaporan yang rutin dari penerima program Satu Rumah Satu Sarjana. Pelaporan tersebut berlaku bagi seluruh penerima program baik yang lulus maupun tidak lulus. Dengan demikian, akan ada data yang menunjukkan ketelusuran

sehingga nantinya tingkat capaian atau keberhasilan memungkinkan untuk dapat terukur. Sebagai implikasinya melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kepada pihak terkait yang terlibat dan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi kepada pihak yang ingin mengadopsi program Satu Rumah Satu Sarjana untuk dapat diterapkan di wilayah lain sehingga dapat lebih baik. Dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah ketika program ini sudah berjalan dalam waktu yang panjang dan kuantitas penerima bantuan program sudah tinggi, maka penelitian selanjutnya dapat meninjau lebih lanjut mengenai keberlanjutan dan efektivitas dari program Satu Rumah Satu Sarjana.

Referensi

- [1] S. F. N. Fitri, "Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 5, no. 1, pp. 1617–1620, 2021.
- [2] P. Rydén, "Dean Digest," *Dean Educ. ITU*, pp. 1–3, 2021.
- [3] OECD, *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*, vol. I. 2019. doi: 10.1787/g222d18af-en.
- [4] N. K. A. S. Cahyani, N. L. P. Suciptawati, and I. K. G. Sukarsa, "Identifikasi Faktor yang Memengaruhi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Badung," vol. 8, no. November, pp. 289–297, 2019.
- [5] E. Birawan, "Sah! Panggungharjo Jadi Desa Anti Korupsi." [Online]. Available: <https://www.panggungharjo.desa.id/sah-panggungharjo-jadi-desanti-korupsi/>
- [6] A. M. E. S. Lestari, "Mewujudkan Budaya Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Melalui Konsep Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi," *Ganesha Civ. Educ. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 335–344, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/1827%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/download/1827/889>
- [7] Y. W. Dasor, "Implementasi Good Governance Dalam Manajemen Berbasis Sekolah," *J. Pendidik. dan Kebud. Missio*, vol. 10, no. 2, pp. 137–273, 2018.
- [8] H. S. Putra, "Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri," *Sci. Work*, vol. 52, no. 03, pp. 125–130, 2020.
- [9] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- [10] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2019.
- [12] S. Lestari and R. V. Salomo, "Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia :," *J. Moderat*, vol. 8, no. November, pp. 798–808, 2022.
- [13] Heldi, Ardiansyah, C. D. Lestari, and E. Sumarni, "Peran Akuntabilitas Terhadap Penyimpangan Abuse Of Power Oleh Pejabat Publik di Indonesia," *J. Digit. Soc.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–38, 2023.
- [14] R. Riswanda, A. Putri Tampubolon, N. Aulia Rachmawati, and N. Thoi, "Pentingnya Keterbukaan Keuangan dan Transparansi Dalam Mempertahankan Kepercayaan Publik Pada Organisasi Nirlaba," *ULIL ALBAB J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 7, pp. 3197–3204, 2023.
- [15] S. G. Somali, "Tata Kelola Pemerintahan Desa," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol.

- 26, no. 1, pp. 141–152, 2021.
- [16] M. S. Wibowo and L. A. Belia, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan,” *J. Manaj. Perhotelan dan Pariwisata*, vol. 6, no. 1, pp. 25–32, 2023, doi: 10.23887/jmpp.v6i1.58108.
- [17] J. R. Bowen, “On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia,” *J. Asian Stud.*, vol. 45, no. 3, pp. 545–561, 1986, doi: 10.2307/2056530.
- [18] R. C. Dewi and Suparno, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,” *J. Media Adm.*, vol. 7, no. 1, pp. 78–90, 2022, doi: 10.54783/dialektika.v19i1.62.